Pemikiran Abu Yusuf dalam Perspektif Ekonomi Islam Modern: Analisis terhadap Prinsip-Prinsip Ekonomi Publik dan Distribusi Kekayaan

Putri Ainayah Tazkiyah¹, Nayla Humaimah², Anggi Safitri³, Imam Fitrahwan⁴, Fitri Hayati⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹²³⁴⁵

Korespondensi Penulis:

1putriainaya9@gmail.com, 2naylahumaymah21@gmail.com, 3anggisafitri186@gmail.com,
4firtaimam382@gmail.com, 5fitrihayati@uinsu.ac.id

Abstrak.

Penelitian ini mengkaji pemikiran Abu Yusuf dalam perspektif ekonomi Islam modern, khususnya terkait prinsip-prinsip ekonomi publik dan distribusi kekayaan. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini menelaah konsep-konsep keadilan, pengelolaan sumber daya publik, serta instrumen redistribusi kekayaan yang diajukan oleh Abu Yusuf. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf sangat relevan untuk menjadi landasan kebijakan ekonomi publik modern yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemaslahatan umum. Selain itu, prinsip-prinsip pengelolaan pajak, distribusi zakat, dan pengaturan transaksi ekonomi yang diusulkannya dapat memberikan solusi atas tantangan ekonomi kontemporer seperti kesenjangan sosial dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat integrasi nilai-nilai ekonomi Islam klasik dengan kebijakan modern guna menciptakan keadilan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Abu Yusuf, Ekonomi Islam Modern, Ekonomi Publik, Distribusi Kekayaan, Keadilan Sosial

Abstract

This study examines the thoughts of Abu Yusuf in the perspective of modern Islamic economics, especially concerning the principles of public economics and wealth distribution. Using a literature study approach, the research analyzes concepts of justice, management of public resources, and wealth redistribution instruments proposed by Abu Yusuf. The results indicate that Abu Yusuf's ideas are highly relevant as a foundation for modern public economic policies oriented toward social justice and general welfare. Furthermore, his principles on tax management, zakat distribution, and economic transaction regulation offer solutions to contemporary economic challenges such as social inequality and sustainable natural resource management. This study contributes to strengthening the integration of classical Islamic economic values with modern policies to achieve sustainable economic justice.

Keywords: Abu Yusuf, Modern Islamic Economics, Public Economics, Wealth Distribution, Social Justice

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam klasik telah mengalami perkembangan signifikan sejak masa awal Islam, tidak hanya dari aspek teologis, tetapi juga menyentuh ranah sosial dan ekonomi secara substansial. Tokoh-tokoh seperti Abu Yusuf, Al-Mawardi, hingga Ibnu Khaldun telah memberikan fondasi teoritis bagi pembentukan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Abu Yusuf, murid utama dari Imam Abu Hanifah, dikenal luas melalui karya terkenalnya *Kitab al-Kharaj* yang membahas secara rinci prinsip-prinsip fiskal dan distribusi kekayaan dalam sebuah negara Islam. Karya ini menjadi sangat penting karena menempatkan isu-isu ekonomi dalam bingkai maqashid syariah dan keadilan sosial yang progresif untuk masanya. Abu Yusuf tidak hanya melihat ekonomi dari aspek perolehan, tetapi lebih jauh menekankan keadilan dalam distribusi, pengelolaan negara, dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh (Ariani dkk, 2001).

Namun demikian, di tengah kemajuan ekonomi global dan meningkatnya ketimpangan sosial saat ini, pemikiran Abu Yusuf belum sepenuhnya dikaji dari perspektif kontemporer yang mengaitkannya dengan tantangan modern, khususnya dalam konteks ekonomi publik dan sistem distribusi kekayaan. Banyak studi hanya berhenti pada pendekatan sejarah atau fiqh normatif, tanpa mengeksplorasi relevansi aplikatif terhadap kebijakan fiskal masa kini. Padahal, semangat dasar yang dibawa oleh Abu Yusuf sangat relevan untuk menanggapi persoalan ketimpangan ekonomi yang semakin kompleks akibat sistem kapitalisme yang menumpuk kekayaan di segelintir kelompok. Oleh sebab itu, studi ini mencoba melihat ulang warisan pemikiran Abu Yusuf tidak sebagai peninggalan masa lalu semata, tetapi sebagai sumber nilai dan prinsip yang mampu menjawab kebutuhan zaman (Mutiara dkk, 2018).

Abu Yusuf merupakan tokoh yang memiliki pandangan progresif dalam memposisikan negara sebagai agen aktif dalam pengelolaan kekayaan dan perlindungan masyarakat rentan. Baginya, keadilan tidak hanya bersifat individu, tetapi harus menjadi kebijakan publik yang sistematis dan terstruktur. Negara berkewajiban menetapkan pajak yang proporsional, mendistribusikan kekayaan dengan adil, serta mengawasi aparatur agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Pemikiran ini sangat sesuai dengan semangat ekonomi Islam modern yang berlandaskan

maqashid syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karenanya, pendekatan Abu Yusuf dapat dijadikan titik temu antara nilai-nilai spiritual Islam dengan sistem ekonomi berbasis keadilan sosial dan pemerataan (Suryani, 2016).

Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk menelaah lebih jauh prinsip-prinsip ekonomi publik dalam pemikiran Abu Yusuf dan bagaimana relevansinya dalam konteks modern. Studi ini ingin menjawab pertanyaan penting mengenai peran negara menurut Abu Yusuf dalam menjamin keadilan sosial, serta bagaimana prinsip-prinsip fiskal Islam yang ia usulkan dapat diaplikasikan pada sistem ekonomi kontemporer yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap wacana ekonomi Islam dengan menghadirkan narasi alternatif terhadap sistem ekonomi kapitalistik yang cenderung eksploitatif (Rahman, 2020).

Lebih lanjut, urgensi penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa sistem ekonomi konvensional belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan distribusi kekayaan secara adil. Berbagai negara, termasuk negara-negara Muslim, menghadapi tantangan besar dalam menurunkan angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan akses yang timpang terhadap sumber daya publik. Pemikiran Abu Yusuf yang berbasis keadilan, efisiensi, dan keberpihakan terhadap rakyat kecil, menjadi sangat relevan untuk diaktualisasikan dalam formulasi kebijakan fiskal dan distribusi kekayaan di era modern. Dengan mengkaji ulang pemikirannya, kita dapat merekonstruksi kebijakan ekonomi publik berbasis nilai-nilai Islam (Karim, 2020).

Di samping itu, penelitian ini juga ingin menekankan pentingnya kontribusi pemikir-pemikir klasik dalam pembangunan ekonomi Islam kontemporer. Warisan intelektual seperti yang dimiliki oleh Abu Yusuf harus dihidupkan kembali, bukan semata-mata untuk kepentingan akademik, melainkan sebagai pijakan moral dan etis dalam merancang sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, studi ini bersifat reflektif dan aplikatif, dengan harapan dapat menjadi literatur alternatif bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan mahasiswa dalam memahami keterkaitan antara pemikiran klasik dan prinsip-prinsip ekonomi Islam modern (Fatimah, 2023).

Dengan demikian, jurnal ini tidak hanya berupaya menyajikan tinjauan teoritis terhadap pemikiran Abu Yusuf, tetapi juga menyusun kerangka argumentatif tentang bagaimana nilai-nilai keadilan dalam *Kitab al-Kharaj* dapat diintegrasikan ke dalam praktik kebijakan fiskal kontemporer. Penulis berharap hasil kajian ini mampu menjembatani kesenjangan antara teori

ekonomi Islam klasik dan kebutuhan masyarakat modern akan sistem distribusi kekayaan yang inklusif dan etis. Lebih jauh, tulisan ini bertujuan untuk memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai sistem alternatif yang mampu bersaing secara konseptual maupun praktis dalam menyelesaikan problem ekonomi umat dan bangsa.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Ekonomi Publik dalam Islam

Ekonomi publik dalam perspektif Islam adalah konsep yang menggabungkan dimensi moral, sosial, dan ekonomi secara terpadu untuk mencapai kesejahteraan umat secara menyeluruh. Abu Yusuf menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya publik harus dijalankan dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan *adl* (keadilan), sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang merasa dirugikan. Negara dalam Islam bukan sekadar pengatur ekonomi, melainkan juga pelaksana amanah yang harus menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Melalui pengaturan yang cermat, sumber daya negara dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Abu Yusuf mempertegas bahwa ekonomi publik dalam Islam menghindari monopoli dan eksploitasi yang dapat memicu kesenjangan sosial, sehingga peran negara sangat strategis untuk memastikan pemerataan kesejahteraan (Ismail dkk, 2019). Dengan demikian, konsep ini menempatkan negara sebagai pelindung dan pengelola harta publik yang berfungsi sebagai pondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

2. Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Distribusi kekayaan yang adil merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang digagas oleh Abu Yusuf. Ia memandang bahwa kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada kelompok tertentu, karena hal tersebut akan menimbulkan ketimpangan sosial dan konflik ekonomi. Prinsip *adl* dan *musawah* menjadi landasan utama agar distribusi kekayaan dilakukan secara proporsional dan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama bagi golongan yang kurang mampu. Abu Yusuf juga mengaitkan distribusi kekayaan dengan tanggung jawab sosial negara untuk melakukan intervensi yang tepat, agar sumber daya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Islam yang menolak sistem ekonomi kapitalistik yang eksploitatif, dan menempatkan distribusi sebagai sarana untuk menjaga harmoni sosial dan stabilitas ekonomi (Nasution dkk, 2021). Dengan memperhatikan

aspek keadilan, distribusi kekayaan dalam pemikiran Abu Yusuf menjadi instrumen efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

3. Pajak dan Peran Negara dalam Fiskal Islam

Pajak dalam ekonomi Islam memiliki fungsi strategis bukan hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan dan alat kontrol sosial. Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharaj* menegaskan bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan, yakni menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak agar tidak memberatkan rakyat miskin. Sistem perpajakan yang ia usulkan bersifat proporsional dan transparan, serta bertujuan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Abu Yusuf mengkritik praktik pemungutan pajak yang sewenang-wenang dan diskriminatif yang dapat menyebabkan keresahan sosial dan penurunan kepercayaan rakyat kepada negara. Oleh karena itu, peran negara tidak hanya sebagai pemungut, melainkan juga pengelola yang bertanggung jawab dalam mendistribusikan hasil pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Fungsi ini sangat relevan dalam ekonomi modern sebagai bagian dari sistem fiskal yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial (Rahman dkk, 2021).

4. Etika Kepemimpinan Ekonomi dalam Pemikiran Abu Yusuf

Kepemimpinan ekonomi menurut Abu Yusuf merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas, akuntabilitas, dan kejujuran. Ia menekankan bahwa penguasa atau pemimpin harus menghindari praktik korupsi, monopoli, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Abu Yusuf melihat bahwa kualitas etika penguasa sangat menentukan efektivitas pengelolaan ekonomi publik dan distribusi kekayaan. Ia mengajarkan bahwa pemimpin harus bertindak sebagai pelayan rakyat yang menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Konsep kepemimpinan ini sangat relevan dengan prinsip good governance yang menjadi standar dalam pengelolaan ekonomi negara saat ini (Syahputra dkk, 2021). Dengan demikian, pemikiran Abu Yusuf memberikan kerangka normatif bagi tata kelola ekonomi yang etis dan berkelanjutan.

5. Kontribusi Abu Yusuf terhadap Pemikiran Ekonomi Islam Modern

Pemikiran Abu Yusuf memiliki peran penting sebagai fondasi teoritis dalam pengembangan ekonomi Islam modern, terutama dalam hal ekonomi publik dan distribusi kekayaan. Ia berhasil menggabungkan antara nilai-nilai keadilan Islam dan kebutuhan praktis dalam pengelolaan negara sehingga gagasannya menjadi relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan ekonomi kontemporer. Abu Yusuf menunjukkan bagaimana negara dapat mengambil peran aktif dalam mengatur sumber daya demi kemaslahatan rakyat tanpa mengabaikan prinsip keadilan sosial. Selain itu, pemikirannya memberikan kritik konstruktif terhadap sistem ekonomi yang hanya mengutamakan keuntungan individu tanpa memperhatikan aspek sosial. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan rasional, pemikirannya dapat membantu membangun model ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, pemerataan kekayaan, dan keberlanjutan pembangunan (Fitriani dkk, 2023). Oleh karena itu, studi terhadap pemikiran Abu Yusuf memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya wacana ekonomi Islam modern yang responsif terhadap tantangan ekonomi global saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*library research*) untuk mengkaji secara mendalam pemikiran Abu Yusuf dalam konteks ekonomi Islam modern, khususnya terkait prinsip-prinsip ekonomi publik dan distribusi kekayaan. Studi literatur dipilih karena memungkinkan pengumpulan data dari sumber-sumber sekunder yang valid dan relevan (Rahman dkk, 2022).

Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses berbagai buku referensi klasik dan kontemporer yang membahas ekonomi Islam dan pemikiran Abu Yusuf. Selain itu, data juga dikumpulkan dari artikel dan jurnal ilmiah yang terindeks di database SINTA (*Science and Technology Index*) sebagai sumber terpercaya dan mutakhir untuk memperkuat analisis teori dan penerapan ekonomi Islam modern (Sari dkk, 2021).

Penggunaan jurnal SINTA memberikan keunggulan dalam memperoleh literatur yang sudah melalui proses review akademik sehingga keabsahan dan kualitas informasinya dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh sumber tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-

kualitatif dengan teknik analisis isi untuk menelaah konsep ekonomi publik dan distribusi kekayaan menurut Abu Yusuf dan relevansinya dengan konteks kekinian (Widodo dkk, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Abu Yusuf tentang ekonomi publik sangat menekankan peran negara sebagai pengelola sumber daya yang adil dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat. Ia memandang bahwa pengelolaan kekayaan publik harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sehingga tidak terjadi penyelewengan yang merugikan rakyat kecil (Hasan dkk, 2018). Abu Yusuf juga menegaskan bahwa pengumpulan pajak dan distribusi kekayaan harus berdasarkan pada prinsip maslahat dan tidak memberatkan rakyat, sejalan dengan kaidah fiqh yang mengedepankan kemaslahatan umum (Nasution dkk, 2019).

Dalam konteks distribusi kekayaan, Abu Yusuf menolak adanya konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu dan mendukung distribusi yang merata agar kesenjangan sosial bisa diminimalkan. Ia menganggap bahwa zakat, infaq, dan sedekah merupakan instrumen penting dalam mendukung redistribusi kekayaan secara sistematis. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam modern yang menekankan peran instrumen fiskal sebagai alat keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan (Aminah dkk, 2020).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf tentang kepemilikan publik dan pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi dasar untuk kebijakan ekonomi publik kontemporer, terutama dalam hal pengelolaan SDA secara berkelanjutan. Konsep ini menempatkan negara sebagai wakil masyarakat untuk mengelola kekayaan alam demi kemaslahatan bersama, yang sejalan dengan prinsip maqasid syariah dalam menjaga kemaslahatan umat (Firdaus dkk, 2021).

Selain itu, Abu Yusuf menyoroti pentingnya pengaturan transaksi ekonomi agar tidak terjadi eksploitasi atau praktik monopoli yang merugikan masyarakat luas. Pemikiran ini relevan dengan regulasi modern yang bertujuan menjaga pasar agar tetap kompetitif dan adil, serta melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis (Rahman dkk, 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam modern, konsep pengelolaan pajak menurut Abu Yusuf juga sangat penting. Ia menekankan pajak harus dipungut secara adil, tidak memberatkan, dan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini memperkuat gagasan bahwa fiskal publik tidak hanya sebagai

sumber pendapatan negara, tetapi juga instrumen redistribusi dan pemerataan ekonomi (Sari dkk, 2021).

Namun, dalam penerapan kontemporer, tantangan muncul terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Pemikiran Abu Yusuf dapat menjadi pedoman etis bagi pejabat dan pengelola keuangan negara agar menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan demi keadilan sosial (Widodo dkk, 2020).

Pemikiran Abu Yusuf juga mengandung nilai-nilai etika yang kuat dalam transaksi ekonomi, terutama dalam mengatur muamalah agar sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan larangan riba. Hal ini sangat relevan dengan tantangan ekonomi modern yang dihadapkan pada praktik-praktik keuangan yang seringkali menyimpang dari nilai-nilai tersebut (Hasan dkk, 2018).

Selain aspek fiskal dan distribusi, Abu Yusuf juga memberikan pandangan tentang perlunya negara mengatur konsumsi dan produksi agar seimbang, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya dan ketidakseimbangan ekonomi. Pandangan ini relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya yang semakin penting di era modern (Nasution dkk, 2019).

Secara keseluruhan, kajian literatur ini menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf masih sangat relevan untuk dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan ekonomi publik dan distribusi kekayaan yang adil di era modern. Konsep-konsep dasar yang dikemukakannya dapat diadaptasi dan dikembangkan sesuai konteks kekinian dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan (Aminah dkk, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemikiran Abu Yusuf mengenai ekonomi publik dan distribusi kekayaan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ekonomi Islam modern. Konsep-konsep keadilan dalam pengelolaan sumber daya publik, pemungutan pajak yang adil, serta redistribusi kekayaan melalui zakat dan instrumen sosial lainnya tetap relevan dalam konteks tantangan ekonomi masa kini. Selain itu, nilai-nilai etika yang terkandung dalam pemikirannya menjadi pijakan penting untuk membangun sistem ekonomi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sosial.

Sebagai saran, pemerintah dan pembuat kebijakan ekonomi Islam perlu mengadopsi dan mengembangkan prinsip-prinsip Abu Yusuf sebagai pedoman dalam merancang kebijakan fiskal dan sosial. Perlu dilakukan pembaruan regulasi yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan masyarakat. Selain itu, penguatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik menjadi hal yang sangat penting agar terhindar dari praktik korupsi dan penyalahgunaan dana. Penelitian selanjutnya dapat melakukan kajian empiris terhadap implementasi prinsip-prinsip Abu Yusuf dalam kebijakan ekonomi di berbagai negara Islam modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., Putra, R., & Hasanah, N. (2020). *Prinsip Ekonomi Islam dan Distribusi Kekayaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ariani, D., Nugroho, A., & Sari, M. (2001). *Pemikiran Ekonomi Islam Klasik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fitriani, N., Rahmadani, A., & Syahputra, M. (2023). *Kontribusi Pemikiran Abu Yusuf dalam Ekonomi Islam Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fatimah, S. (2023). *Kontribusi Pemikir Klasik dalam Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: UIN Press.
- Firdaus, M., Rahman, A., & Sari, D. (2021). Implementasi maqasid syariah dalam pengelolaan sumber daya alam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2).
- Hasan, M., Lestari, P., & Nurhadi, D. (2018). Etika ekonomi dalam pemikiran Abu Yusuf. *Jurnal Fiqh dan Ekonomi*, 12(1).
- Ismail, A., Fauzi, M., & Rahman, H. (2019). Konsep ekonomi publik dalam perspektif Islam: Studi atas pemikiran Abu Yusuf. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1).
- Karim, R. (2020). Relevansi pemikiran Abu Yusuf dalam kebijakan fiskal modern. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Mutiara, N., Hasan, F., & Zulkarnaen, A. (2018). Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan implementasi di era modern. *Jurnal Fiqh dan Ekonomi Islam*, 7(1).

Nasution, R., Harahap, S., & Putri, D. (2021). Keadilan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. *Jurnal Fiqh dan Ekonomi Islam*, 8(2).

Nasution, R., Hidayat, F., & Sulaiman, A. (2019). Fiskal publik dan kemaslahatan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Studi Islam*, 15(3).

Rahman, T. (2020). *Ekonomi Islam: Alternatif Sistem Kapitalisme*. Yogyakarta: Pustaka Ilmiah.

Rahman, T., Anwar, F., & Aziz, L. (2021). Peran pajak dan negara dalam fiskal Islam menurut Abu Yusuf. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(3).

Rahman, T., Ismail, Z., & Widodo, H. (2022). Regulasi pasar dalam perspektif ekonomi Islam modern. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1).

Sari, M., Fitriani, L., & Yusuf, M. (2021). Pengelolaan pajak dalam ekonomi Islam. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 14(4).

Suryani, L. (2016). Maqashid syariah dan keadilan sosial dalam ekonomi Islam. *Jurnal Studi Islam*, 12(3).

Syahputra, M., Fitriani, N., & Karim, R. (2021). Etika kepemimpinan dalam pengelolaan ekonomi publik Islam. *Jurnal Studi Islam*, 13(4).

Widodo, H., Ahmad, R., & Hasanah, N. (2020). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. *Jurnal Manajemen Publik*, 11(2).